

# PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN RESPONSIVITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT

Eriana Sri Rahayu<sup>1\*</sup>, Hestin Sri Widiawati<sup>2</sup>, Sigit Puji Winarko<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Nusantara PGRI Kediri

\*E-mail: [eeriana56@gmail.com](mailto:eeriana56@gmail.com)

---

## ABSTRACT

**Purpose:** This study aims to examine the factors influencing Village Fund Management and their implications for community well-being in Galengdowo Village, Wonosalam District, Jombang Regency. The implementation of good governance principles in village administration is essential for ensuring effective, transparent, and accountable management of village funds. However, various issues in village fund management, including fund misuse, weak accountability, limited transparency, and inadequate governmental responsiveness, continue to hinder the achievement of community well-being.

**Method:** This study employed a quantitative causal research design. Primary data were collected through questionnaires using a Likert scale, while secondary data were obtained from relevant documentation. The population consisted of 3,868 residents of Galengdowo Village. Respondents were selected using purposive sampling based on predetermined criteria relevant to the study objectives. The sample size was determined using the Slovin formula with a 10% margin of error, resulting in a minimum sample of 96 respondents. Data analysis was conducted using classical assumption tests, multiple linear regression analysis, Moderated Regression Analysis (MRA), coefficient of determination ( $R^2$ ), and hypothesis testing.

**Findings:** The results indicate that Accountability does not have a significant effect on Village Fund Management, whereas Transparency and Responsiveness have significant positive effects. Simultaneously, Accountability, Transparency, and Responsiveness significantly influence Village Fund Management. Furthermore, the moderation analysis reveals that Community Well-being significantly moderates the relationships between Accountability and Village Fund Management as well as between Responsiveness and Village Fund Management. However, Community Well-being does not moderate the relationship between Transparency and Village Fund Management.

**Novelty:** The novelty of this study lies in the integration of Responsiveness as a governance dimension in the Village Fund Management model and the use of Community Well-being as a moderating variable. Unlike previous studies that primarily focused on the direct effects of accountability and transparency, this study investigates how community well-being strengthens or weakens the relationships between governance principles (accountability, transparency, and responsiveness) and Village Fund Management. This approach provides a more comprehensive understanding of the interaction between governance practices and community outcomes in the context of village fund administration.

## Keywords:

Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Responsivitas, Kesejahteraan Masyarakat

---

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia yang terdiri dari beberapa wilayah. Desa adalah bagian dari pemerintahan yang berada di bawah wilayah kabupaten atau kota dalam suatu negara. Sebagai tingkat pemerintahan paling rendah dalam struktur pemerintahan daerah, desa memiliki kedudukan yang sangat penting. Selain mempunyai manfaat sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, desa juga berperan sebagai institusi pemerintahan yang mendukung dan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintah desa adalah pihak yang bertugas mengelola pemerintahan. Tanggung jawab ini dilakukan oleh kepala desa, yang dimana didampingi oleh jajaran pengurus desa sebagai bagian dari elemen pemerintahan desa. Desa sebagai bentuk

pemerintahan kecil yang membutuhkan motivasi, aspirasi untuk mendukung kemajuan dan terlaksananya pembangunan desa, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa, dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa, dengan penekanan pada prioritas penggunaan dana seperti penanggulangan kemiskinan ekstrem, terjadi perubahan iklim, adanyalayanan kesehatan desa termasuk stunting, ketahanan pangan, pengembangan potensi desa, dan pengembangan desa digital (Pipit Mulyah at al 2024). Penerapan *Good Governance* yang baik merupakan suatu keharusan bagi sebagian besar Pemerintah Desa untuk membangun sistem politik dan pemerintahan yang lebih baik, dalam hal mendukung pemerintah bergerak sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* yang dimana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Tomuka, 2021). Desa dikatakan memiliki tata kelola pemerintah yang baik, yang dapat menerapkan instrument *Good Governance*, pengelolaan dana yang akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas adalah instrument dalam mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Upaya mencegah terjadinya transaksi kecurangan dalam pemerintahan dengan cara menerapkan akuntabilitas menjamin setiap tindakan dan penggunaan sumber daya dapat di pertanggungjawabkan, transparansi menciptakan keterbukaan pemerintah dalam menggunakan sumber dana, responsivitas yang dimana masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa. Diharapkan dapat berfungsi secara optimal sehingga tujuan Dana Desa tercapai dengan baik, karena hal tersebut akan memungkinkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat desa dengan cara meningkatkan kesejahteraan mereka (Febrianti et al., 2024).

Desa memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, antara lain Pendapatan Asli Desa (PADes), bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dari pemerintah pusat, alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dana yang diberikan kepada desa tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan. Pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020. Dalam penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), diperlukan perhatian terhadap berbagai aspek agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan akuntabel. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Penyimpangan tersebut kerap melibatkan aparatur desa maupun kepala desa dalam bentuk korupsi atau penyalahgunaan kewenangan. Keadaan ini mengindikasikan bahwa salah satu penyebab tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan di Indonesia adalah adanya penyimpangan dalam implementasi program yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang terlibat dalam proses pelaksanaannya.

Fenomena tersebut di temukan di Desa Galengdowo, menyatakan bahwa dugaan kuat anggaran dana desa yang tidak sesuai dengan realisasinya. Ketidaksesuaian anggaran yaitu pada belanja sarana prasarana, selain itu juga kurangnya terhadap kendala aspek pengelolaan keuangan desa berdasarkan (<https://jejakkasustv.com/dugaan-kuat-anggaran-dana-desa-tahun-2023-di-desa-wonosalam-tidak-sesuai-realisasinya/>) kurangnya update keterbukaan akses anggaran ke masyarakat, dan kurang optimalnya partisipasi maupun aspirasi masyarakat dalam setiap forum musyawarah desa. Kasus seperti ini dapat di sebut bahwa tata kelola pada dana desa yang belum optimal di tingkat akuntabilitas, transparansi, serta responsivitas yang sepenuhnya belum mencerminkan prinsip *Good Governance*. Cara yang bisa dilakukan untuk mengakhiri masalah adalah dengan menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik yaitu *Good Governance*.

*Good Governance* adalah bentuk pengelolaan pemerintahan yang bersih, yang diminta oleh masyarakat agar mendapatkan layanan publik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Penerapan akuntansi di bidang pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh instansi pusat, akan tetapi di tingkat desa memerlukan pertanggungjawaban untuk setiap

anggaran dan kegiatan yang dilakukan. Namun, adakala pihak terkait yang terlibat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang belum maksimal memahami penerapan akuntansi pemerintah, terutama di daerah pedesaan. Dari tingkat transparansi, diketahui belum adanya akses untuk informasi pada penggunaan dana desa, belum di jelaskan di paparkan kepada masyarakat, informasi tersebut hanya berupa banner yang ada di kantor desa, dengan begitu minimnya akses publik terhadap kelengkapan informasi pengelolaan dana desa. Sementara itu tingkat responsivitas terhadap masyarakat juga kurang, seperti penyaluran aspirasi, forum masyarakat desa. Karena responsivitas masyarakat membantu peran pemerintah desa dalam memenuhi aspirasi dan keinginan masyarakat.

Seperti peneliti sebelumnya mengenai penerapan *Good Governance* di desa. Safitri & Maghfur (2023) menyatakan bahwa komponen akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh signifikan dalam mencapai *Good Governance*. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa di beberapa desa, pemahaman aparatur desa serta masyarakat tentang konsep akuntabilitas dan transparansi masih terbatas. Hal ini menyebabkan akuntabilitas dan transparansi secara hasil tidak memberikan dampak yang signifikan pada kualitas *Good Governance*. Menurut (Maghfirah et al., 2023) bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan dana desa. Dapat di simpulkan pada penelitian ini menerangkan bahwa tingkat akuntabilitas dan transparansi berkontribusi pada efektivitas pengelolaan dana desa. Jurnal et al (2023) menyatakan bahwa penerapan pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terkait karakteristik penutupan kas di akhir bulan. Dengan begitu, transparansi dalam pengelolaan masyarakat dapat menyalurkan informasi bahwa dana desa tetap terjaga.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perhatian terhadap desa, diperlukan beberapa langkah agar terbentuknya akuntabilitas, transparansi, responsivitas dalam pengelolaan desa. Hal ini bertujuan menciptakan pengelolaan desa yang baik dan efektif. Pengelolaan desa yang baik dan efektif memiliki peran penting dalam kelangsungan dan pertumbuhan organisasi, karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengelolaan keuangan desa harus diatur dan dilaporkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah. Hal ini dilakukan karena masih ada perbedaan hasil penelitian sebelumnya, sehingga diperlukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa. Karena masih ada perbedaan dalam hasil penelitian sebelumnya, maka analisis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa perlu dilakukan. Kebaharuan pada penelitian ini terletak pada variabel yang di uji penambahan variabel moderasi yang digunakan untuk memperkuat variabel dependen dan independen.

Berdasarkan fenomena tersebut, permasalahan dari penelitian ini di rumuskan sebagai berikut: Apakah Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsivitas mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa, dan Apakah Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsivitas mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa melalui Kesejahteraan Masyarakat.

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### ***Good Governance Theory dan Agency Theory***

Menurut (United Nations Development Programme (UNDP) 1997, di kutip pada (Jamaluddin, 2021), *Good Governance Theory* merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi publik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten. Dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas berperan untuk memastikan bahwa penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan, transparansi berfungsi memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat, sedangkan responsivitas diperlukan untuk menanggapi kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara optimal dapat mendukung pengelolaan dana desa yang efektif dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Jensen dan Meckling 1976, (Wahyuni et al., 2026), *Agency Theory* menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent*, di mana *principal* memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola sumber daya guna mencapai tujuan tertentu. Dalam pemerintahan desa, masyarakat berperan sebagai *principal* yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai *agent*

untuk mengelola dana desa. Hubungan ini dapat menimbulkan asimetri informasi karena pemerintah desa memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas diperlukan untuk mengurangi kesenjangan informasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan secara efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

### **Teori Pengelolaan Dana Desa**

Keuangan desa meliputi seluruh hak dan kewajiban aparat desa dapat dinilai dalam bentuk uang, termasuk segala bentuk barang maupun jasa yang dapat dimanfaatkan dan menjadi aset desa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Azizah, 2022). Dalam pengelolaan keuangan desa, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Pengawasan tersebut bertujuan guna mencegah terjadinya penyimpangan, sehingga pihak yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan pedoman yang berlaku dapat dikenakan hukuman sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Penerapan kebijakan dana desa yaitu salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah yang masih tergolong tertinggal (Gulo & Kakisina, 2023). Pengelolaan keuangan desa mencakup serangkaian pengelolaan keuangan desa mencakup serangkaian tahapan yang terdiri atas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Seluruh tahapan tersebut merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif serta mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat desa (Wiwik Lestari et al., 2022).

### **Teori Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang mendapatkan amanah untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas, tindakan, dan keputusan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang menyalurkan amanah serta memiliki hak untuk pertanggungjawaban tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui penyampaian dan pengungkapan informasi secara jelas, jujur, dan transparan (Setyaningrum et al., 2024). Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai tanggung jawab pihak yang diberi kewenangan dalam menjalankan sumber daya publik untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang bersangkutan dengan pemanfaatan sumber daya tersebut kepada pihak yang memberikan kewenangan.. Penerapan akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja dan kualitas pelayanan lembaga pemerintah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara lebih transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Maghfirah et al., 2023). Selain itu, akuntabilitas mencerminkan kewajiban individu, badan hukum, maupun pimpinan organisasi untuk memberikan penjelasan atas tindakan, kinerja, dan keputusan yang telah diambil kepada pihak yang berwenang. Akuntabilitas yang didukung oleh sistem pelaporan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara baik dan tepat akan menghasilkan informasi yang relevan, terpercaya, serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan dan penilaian kinerja organisasi. (Udzmah et al., 2024). Oleh seperti itu, penerapan prinsip akuntabilitas memiliki peran yang penting dalam pengelolaan dana desa guna memastikan penggunaan dana dilakukan secara tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

### **Teori Transparansi**

Transparansi merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat secara memadai, mudah diakses, dan mudah di dapatkan oleh seluruh pihak yang membutuhkan. Melalui penerapan transparansi, masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta hasil yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan (Goo & Sanda, 2022). Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini

didasarkan pada hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang dimiliki serta mempertanggungjawabkan penggunaannya. Transparansi juga mencakup keterbukaan informasi mengenai tindakan, keputusan, dan kinerja individu, badan hukum, maupun pengarah organisasi kepada orang yang mempunyai hak dan kewenangan untuk memperoleh informasi tersebut (Budiarti & Retnani, 2021). Pada pengelolaan dana desa, transparansi menjadi salah satu prinsip penting yang harus diterapkan oleh pemerintah desa. Transparansi memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat mengenai perencanaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana desa. Dengan di paparkan keterbukaan informasi, masyarakat dapat melakukan pengawasan pada pengelolaan dana desa sehingga menciptakan kepercayaan publik dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, transparansi mempunyai peran yang sangat penting guna mewujudkan pengelolaan dana desa efektif dan bertanggung jawab.

### **Teori Responsivitas**

Responsivitas merupakan kemampuan dan kesediaan pemerintah dalam pelayanan publik untuk mengenali, merespon, serta memahami kebutuhan, aspirasi, maupun keluhan masyarakat secara tepat dan cepat. Responsivitas mencerminkan bentuk tanggung jawab aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berlandaskan pada kepentingan masyarakat. Setiap lembaga publik seharusnya mengarahkan kebijakan dan mekanisme kerjanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Apabila prinsip responsivitas tidak diterapkan dengan baik, maka pelayanan yang diberikan cenderung lambat, kurang efektif, dan tidak mampu memenuhi harapan masyarakat (Moenek & Suwanda, 2022). Responsivitas juga berkaitan dengan kesiapan aparatur dalam memberikan pelayanan, menanggapi permintaan masyarakat, serta menyediakan informasi yang diperlukan secara tepat waktu. Kemampuan untuk merespons berbagai kebutuhan dan permasalahan masyarakat secara cepat merupakan salah satu indikator penting dalam kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang responsif dapat meningkatkan kepuasan masyarakat karena menunjukkan adanya perhatian dan komitmen pemerintah terhadap kepentingan publik (Nurhidayat, 2023). Oleh sebab itu, Responsivitas sangat penting bagi Pengelolaan Dana Desa.

### **Teori Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai keadaan ketika kebutuhan spiritual, material, dan sosial masyarakat telah terpenuhi sehingga mereka mampu menjalani kehidupan yang layak, berkembang secara optimal, serta melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Konsep kesejahteraan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup terciptanya rasa aman, nyaman, dan tenteram, serta tersedianya peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, maka masyarakat dapat mencapai kehidupan yang lebih bermartabat dan produktif. Namun demikian, berbagai permasalahan kesejahteraan sosial masih ditemukan di tengah masyarakat, yang ditandai dengan belum terpenuhinya kebutuhan dasar sebagian warga secara memadai akibat keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dan pembangunan. Kondisi tersebut dapat menghambat masyarakat dalam menjalankan peran sosialnya secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik yang berkelanjutan. Kesejahteraan masyarakat juga dipengaruhi oleh tingkat perkembangan desa yang tercermin dari kualitas pelayanan pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. Semakin baik pelayanan yang diberikan pemerintah dan semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, maka semakin besar pula peluang tercapainya kesejahteraan masyarakat (Telaumbanua & Ziliwu, 2022). Dalam penelitian ini, kesejahteraan masyarakat digunakan sebagai ukuran untuk menilai sejauh mana pengelolaan dana desa mampu memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### **Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Guna Kesejahteraan Masyarakat.**

Akuntabilitas menunjukkan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang transparan, pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan, serta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kepada masyarakat. Menurut teori agensi, akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang menerima amanah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya kepada pihak yang memberikan amanah (*principal*).

Penelitian Situmorang (2024) menunjukkan akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan pada pengelolaan alokasi dana desa. Dalam konteks ini, akuntabilitas bukan hanya bersifat administratif, seperti pelaporan keuangan, tetapi juga bersifat moral dan sosial, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari dana tersebut. Berdasarkan Teori dan hasil penelitian terdahulu, oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa

### **Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Guna Kesejahteraan Masyarakat.**

Transparansi pada pengelolaan dana desa sangat penting digunakan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Transparansi berarti pemerintah desa terbuka. Pemerintahan desa yang baik ditandai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, berintegritas, dan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Transparansi diwujudkan melalui adanya informasi yang akurat, relevan, serta mudah dijangkau oleh masyarakat terkait seluruh prosedur pengelolaan dana desa, mulai dari proses pelaksanaan kegiatan, perencanaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Hasil penelitian terdahulu Lestari Labangu et al., (2022) menerangkan bahwa transparansi mempunyai berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan penggunaan dana desa di Desa Labulu-Bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, yang mengindikasikan bahwa hasil yang tinggi pada tingkat transparansi, maka akan semakin baik pula pengelolaan dana desa yang dilakukan. Berdasarkan Teori dan hasil penelitian terdahulu, oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2 : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa

### **Pengaruh Responsivitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Guna Kesejahteraan Masyarakat.**

Responsivitas pada pengelolaan dana desa menggambarkan kemampuan pemerintah desa untuk tanggap terhadap kebutuhan, aspirasi, serta permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Pemerintah desa yang responsif akan selalu berupaya mendengarkan masukan masyarakat dan menyesuaikan kebijakan serta program pembangunan yang sejalan dengan kejadian riil yang ada di lapangan. Menurut *Good Governance Theory*, responsivitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang menekankan kemampuan pemerintah untuk mengenali, memahami, dan menanggapi kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kepentingan publik.

Hasil penelitian Arsyadita et al (2023), peneliti menyimpulkan bahwa tingkat responsivitas dalam pengelolaan desa berpengaruh signifikan terhadap daya tanggap pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. responsivitas aktif dari masyarakat. Berdasarkan Teori dan hasil penelitian terdahulu, oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3 : Responsivitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa

### **Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Responsivitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa.**

Akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas merupakan prinsip-prinsip fundamental yang perlu diterapkan untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang sesuai sasaran dan efektif. Akuntabilitas mencerminkan tugas pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan setiap digunakannya dana desa secara terbuka serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi dalam menciptakan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, semakin baik penerapan akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas secara simultan, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan dana desa yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian (Azis & Tatmimah, 2025) menjelaskan bahwa akuntabilitas, responsivitas, dan transparansi terhadap keyakinan masyarakat di Desa Bojong Kulon menunjukkan bahwa secara bersama ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat keyakinan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka semakin baik pula tingkat kepercayaan masyarakat pada pengelolaan dana desa. Berdasarkan Teori dan hasil penelitian terdahulu, oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4 : Akuntabilitas, Transparansi, Responsivitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa

### **Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Responsivitas Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa Melalui Kesejahteraan Masyarakat.**

Akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas adalah tiga hal penting dalam penerapan konsep *Good Governance*. Ketiga hal ini saling terkait dan saling memperkuat, sehingga mampu Mewujudkan tata kelola dana desa yang berintegritas, terbuka, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Diterapkannya ketiga prinsip ini bersamaan, pengelolaan dana desa akan menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga hasil yang di berikan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan. Akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas ialah faktor sangat penting yang mempengaruhi pengelolaan dana desa, Dampak dari penerapan ketiga variabel tersebut tercermin pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Hasil dari penelitian Jempper & No (2022) secara simultan, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas berpengaruh signifikan yakni mendukung terciptanya pengelolaan dana desa yang optimal, sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kondisi ekonomi, kesejahteraan sosial, serta perkembangan pembangunan infrastruktur desa. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, oleh karena itu hipotesis dalam penelitian in adalah:

H5 : Akuntabilitas, Transparansi, Responsivitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa melaluikesejahteraan masyarakat.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif, yakni metode penelitian yang berpedoman pada pendekatan empiris untuk menguji suatu hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Pendekatan kuantitatif diterapkan dengan meneliti populasi atau sampel yang digunakan melalui pengumpulan data menggunakan perangkat ukur penelitian yang kemudian dianalisis secara statistik. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kausalitas, yang mempunyai tujuan untuk menganalisis dan meneliti hubungan sebab akibat setiap variabel yang diteliti. Data penelitian diperoleh dengan penyebaran kuesioner dengan menerapkan skala Likert 1–5. Skala tersebut diterapkan untuk mengukur tingkat persetujuan, sikap, presepsi, serta penilaian responden guna pernyataan yang diberikan. Penelitian ini melibatkan variabel independen sebagai variabel yang memengaruhi, variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi, variabel moderasi yang berfungsi sebagai variabel mediasi dalam hubungan antarvariabel. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan fenomena yang terjadi, tetapi juga menguji pengaruh dan hubungan kausal antarvariabel. Proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan

alat perangkat lunak IBM SPSS versi 23. Teknik pengumpulan output data yang diterapkan adalah survei melalui penyebaran kuesioner tertutup, sehingga responden hanya perlu memilih jawaban yang paling selaras dengan kondisi atau pendapat mereka. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang yang berjumlah 3.868 jiwa. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria peneliti yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Melalui teknik ini, responden dipilih sesuai dengan kriteria karena dianggap paling relevan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

**Tabel 1**  
**Pengambilan Sampel**

No	Keterangan	Jumlah
1	Seluruh Masyarakat Desa Galengdowo	3.868
2	Masyarakat berumur < 20 tahun dan berumur > dari 59 tahun ( umur 0 - 4 tahun (57), umur 5 - 9 tahun (151), umur 10 – 14 tahun (224), umur 15 – 19 (297), umur 60 – 64 (210), umur 65 + (560)).	(1.499)
<b>Jumlah Sampel Penelitian</b>		<b>2.369</b>

Sumber : Data Desa 2025

Berdasarkan kriteria *Purposive Sampling* yang telah di tentukan oleh peneliti, total populasi 3.868 orang di peroleh 2.369 responden yang memenuhi kriteria, yang dimana hasil dari pemilihan sampel akan di bantu menentukan jumlah sampel dengan cara melalui perhitungan menggunakan rumus slovin guna mengetahui jumlah responden yang diperlukan dalam penelitian. Perhitungan jumlah sampel dilakukan dengan menerapkan rumus slovin seperti berikut:

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Presentase batas toleransi (*margin of error*).

Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 N &= \frac{n}{1+Ne^2} \\
 &= \frac{2.369}{1+2.369(0,1)^2} \\
 &= \frac{2.369}{1+2.369(0,01)} \\
 &= \frac{2.369}{1+23,69} \\
 &= \frac{2.369}{24,69} \\
 &= 95,95 \text{ di bulatkan menjadi } 96
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, peneliti menentukan tingkat kesalahan sebesar 10% (0,1), artinya peneliti masih menerima kemungkinan adanya kesalahan sebesar 10% saat memilih sampel. Dengan menerapkan rumus Slovin. Hal ini dilakukan untuk memudahkan akses dan menghemat waktu, namun tetap memastikan data yang diperoleh akurat dan hasil penelitian valid. Pemilihan penggunaan

teknik *purposive sampling* karena pemilihan responden dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah sampel yang dibutuhkan adalah minimal 96 responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum

Desa Galengdowo yakni salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Dilihat secara geografis, desa ini di kawasan dataran tinggi yang memiliki karakteristik alam pegunungan., sehingga memiliki kondisi lingkungan yang sejuk dan relatif asri. Letak geografis tersebut memberikan potensi yang cukup besar bagi Desa Galengdowo dalam pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Desa yang mencakup 5 dusun yaitu terdiri dari :

**Tabel 2**  
**Dusun di Desa Galengdowo**

No	Instansi	RW	RT
1	Dusun Wates	1	1-2
2	Dusun Sanggar	2	3-4
3	Dusun Plumpung	3	5-8
4	Dusun Galengdowo	4	9-11
5	Dusun Pengajaran	5	12-18

**Sumber. Data desa 2025**

Mayoritas masyarakat Desa Galengdowo menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian dan perkebunan, dengan komoditas utama yang meliputi kopi, durian, serta berbagai jenis tanaman hortikultura. Selain sektor tersebut, sebagian penduduk juga beraktivitas dalam bidang perdagangan, jasa, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dari aspek sosial kemasyarakatan, masyarakat Desa Galengdowo memiliki kehidupan sosial yang cukup harmonis dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam berbagai kegiatan masyarakat.

### Hasil Uji Analisis Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menilai apakah data yang digunakan pada model regresi sudah sesuai memiliki distribusi yang normal. Dalam analisis regresi, salah satu asumsi yang harus dipenuhi yakni bahwa nilai residual atau kesalahan prediksi mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, pengujian normalitas diperlukan untuk menentukan bahwa model regresi layak digunakan dan memenuhi asumsi .

Dari hasil pengujian normalitas dengan digunakan metode Kolmogorov-Smirnov, didapatkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai tersebut berada di atas batas signifikansi sesuai pedoman, yaitu 0,05, sehingga residual penelitian dapat dinyatakan berdistribusi normal. Temuan ini menerangkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan di antara distribusi data residual dengan distribusi normal, oleh karena itu asumsi normalitas telah terpenuhi dan model regresi dapat digunakan untuk mendapatkan analisis yang valid dan reliabel.

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diterapkan untuk mengidentifikasi terjadi adanya dan tidak terjadinya korelasi yang tinggi pada masing masing variabel independen dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik harus terbebas dari hubungan yang kuat di antara variabel bebas, karena adanya korelasi yang tinggi dapat mengganggu kestabilan model serta melemah ketepatan dalam mengestimasi pengaruh individu variabel independen terhadap variabel dependen.

Dapat di simpulkan pada tabel di atas bahwasannya nilai toleransi untuk semua variabel (Akuntabilitas ,774, transparansi ,710, responsivitas ,695) > 0,10 dan nilai VIF (Akuntabilitas 1,293, transparansi 1,408, responsivitas 1,438) < 10. Menunjukkan bahwasannya tidak ada nya gejala Multikolinearitas.

### Uji Heterokedasitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan guna menguji apakah adanya perbedaan varians residual pada model regresi. Model regresi yang memenuhi asumsi klasik ialah model yang tidak adanya heteroskedastisitas, yaitu ketika varians residual tetap atau konstan pada setiap tingkat prediksi, yang dikenal sebagai kondisi homoskedastisitas.

Berdasarkan grafik scatterplot pada gambar tertera, terlihat titik-titik data tersebar secara acak dan tidak terjadinya membentuk pola tertentu. Oleh karena itu, penyebaran titik berada secara merata di atas maupun di bawah garis 0 di sumbu Y. Kondisi ini menjelaskan bahwa varians residual cenderung relatif tetap pada berbagai nilai prediksi variabel dependen, sehingga dapat disimpulkan terdapat model regresi tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

### Hasil Uji *Moderating Regression Analysis*

*Moderated Regression Analysis* (MRA) yakni metode analisis regresi yang digunakan pada pengujian peran variabel moderasi dalam hubungan variabel independen dan variabel dependen. Analisis ini bertujuan guna mengetahui apakah variabel moderasi mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam suatu teknik penelitian.

**Tabel 4**  
**Uji MRA**

Model	<i>Coefficient<sup>a</sup></i>	
	<i>Unstandardized Coefficients</i> B	Std. Error
1. <i>Constant</i>	16,783	4,025
Akuntabilitas	-3,726	1,859
Transparansi	-.310	1,996
Responsivitas	4,214	1,846
X1M	,093	0,46
X2M	,011	0,49
X3M	-,097	0,46

*a. Dependent Variable : Pengelolaan Dana Desa*

Sumber: Output SPSS versi 23

Berdasarkan nilai pada tabel *Coefficients*, baris pertama adalah nilai konstanta (a), dan baris berikutnya adalah koefisien regresi untuk variabel bebas, variabel moderasi, dan interaksi antar variabel bebas dan moderasi. Sehingga persamaan *Moderating Regression Analysis* (MRA) dapat disusun sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 (X_1 * Z) + \beta_5 (X_2 * Z) + \beta_6 (X_3 * Z) + \epsilon$$

$$Y = 16,783 - 3,726X_1 - 0,310X_2 + 4,214X_3 + 0,093 (X_1 \times Z) + 0,011 (X_2 \times Z) - 0,097 (X_3 \times Z)$$

Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa memiliki nilai dasar sebesar 16,783 ketika variabel Akuntabilitas, Transparansi, Responsivitas, dan Kesejahteraan Masyarakat diasumsikan bernilai nol. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa variabel Akuntabilitas memiliki koefisien negatif sebesar -3,276 dan Transparansi dengan nilai koefisien negatif bernilai -0,310, yang menerangkan adanya hubungan berlawanan arah pada Pengelolaan Dana Desa. Sementara itu, Responsivitas mempunyai nilai koefisien positif sebesar 4,214 yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan Responsivitas akan mendorong peningkatan Pengelolaan Dana Desa. Kesejahteraan Masyarakat memperkuat pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan koefisien interaksi sebesar 0,093, serta memperkuat pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan koefisien sebesar 0,011. Sebaliknya, Kesejahteraan Masyarakat memperlemah pengaruh Responsivitas terhadap Pengelolaan Dana Desa menghasilkan koefisien interaksi sebesar -0,097.

### Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda ialah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan fungsional pada beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat secara bersamaan.

**Tabel 5**  
**Uji Regresi Linier Berganda**

<i>Coefficient<sup>a</sup></i>		
Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>	
	B	Std. Error
1. Constant	11,452	2,587
Akuntabilitas	0,109	0,111
Transparansi	0,341	0,100
Responsivitas	0,246	0,106

*a. Dependent Variable : Pengelolaan Daa Desa*

**Sumber: Output SPSS versi 23**

Berdasarkan tabel yang tertera, maka didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 11,452 + 0,109X_1 + 0,341X_2 + 0,246X_3$$

Hasil pengujian regresi, didapatkan nilai konstanta sebesar 11,452 yang mengindikasikan tingkat dasar Pengelolaan Dana Desa apabila variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsivitas diasumsikan tidak mengalami perubahan atau bernilai konstan. Hasil analisis juga menghasilkan bahwa ketiga variabel independen mempunyai koefisien regresi bernilai positif, yaitu Akuntabilitas bernilai sebesar 0,109, Transparansi bernilai sebesar 0,341, dan Responsivitas bernilai sebesar 0,246. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pada tingkat Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsivitas cenderung diikuti oleh peningkatan Pengelolaan Dana Desa. Di antara ketiga variabel tersebut, Transparansi memiliki nilai koefisien terbesar, sehingga dapat disimpulkan Transparansi memberikan pengaruh yang paling dominan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

### Hasil Uji Adjusted R<sup>2</sup>

Digunakan untuk menunjukkan seberapa akurat model bisa memperlihatkan perubahan pada variabel dependen, nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* berkisar antara 0 sampai 1.

**Tabel 6**  
**Uji Adjusted R<sup>2</sup>**

<i>Model Summary</i>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,563 <sup>a</sup>	,317	,295	1,28183

**Sumber: Output SPSS versi 23**

Dapat di lihat pada hasil tabel uji nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,295, maka hal ini menerangkan nilai sebesar 29,5%. Keadaan seperti ini menginterpretasikan bahwa variabel independen yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Responsivitas sebesar 29,5% terhadap Pengelolaan Dana Desa. Sementara itu sisanya 70,5% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak di digunakan dalam penelitian ini.

### Hasil Uji Hipotesis

#### Uji t

Hasil uji t menjelaskan bahwa Transparansi dan Responsivitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan nilai sig. 0,001 dan 0,023, sedangkan Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan. Kesejahteraan Masyarakat mampu memoderasi hubungan Akuntabilitas dan Responsivitas terhadap Pengelolaan Dana Desa, akan tetapi, variabel moderasi tidak menunjukkan kemampuan dalam memengaruhi hubungan antara Transparansi dengan variabel terikat.

#### Uji f

Uji F (simultan) merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kelayakan model regresi

secara keseluruhan, yang dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel atau berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) yang diperoleh dari hasil analisis regresi.

**Tabel 7**  
**Uji F**

<i>Model Summary</i>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1. Regression	70,168	3	23,389	14,235	,000 <sup>b</sup>
Residual	151,165	92	1,643		
Total	221,333	95			

a. Dependent Variabel : Pengelolaan Dana Desa  
b. *Predictors: (Constant), Responsivitas, Akuntabilitas, Transparansi*

**Sumber: Output SPSS versi 23**

Berdasarkan tabel uji F menjelaskan hasil uji statistik dengan signifikan sebesar 0,000. Dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan bahwa nilai signifikan  $< 0,05$  ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara simultan terhadap variabel dependen. Dapat dikatakan Akuntabilitas, Transparansi, Responsivitas secara bersama sama mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa guna kesejahteraan masyarakat.**

Berdasarkan hasil uji hipotesis (H1), diperoleh nilai t-hitung. Variabel akuntabilitas memiliki nilai 0,982, sedangkan nilai t-tabel adalah 1,986. Karena nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel dan nilai signifikansi. Nilai 0,329 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan. Akuntabilitas tidak berdampak besar dalam pengelolaan dana desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa tidak bisa diterima. Dengan demikian, H0 diterima dan H1 ditolak. Kondisi ini dapat terjadi karena akuntabilitas yang diterapkan masih bersifat formalitas administratif untuk memenuhi kewajiban pelaporan kepada pihak terkait, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas pengelolaan dana desa

### **Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa guna kesejahteraan masyarakat.**

Berdasarkan nilai hasil pengujian, didapatkan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  dari nilai Sig. Temuan tersebut mengindikasikan yakni variabel transparansi berpengaruh secara signifikan pada pengelolaan dana desa. Dengan begitu, hasil hipotesis penelitian yang menjelaskan adanya pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa dinyatakan diterima, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana desa mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya akses informasi yang mudah diperoleh, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran desa

### **Pengaruh responsivitas terhadap pengelolaan dana desa guna kesejahteraan masyarakat.**

Dari hasil pengujian hipotesis, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,023 yang berada di bawah batas signifikansi 0,05. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa responsivitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan adanya pengaruh responsivitas terhadap pengelolaan dana desa dinyatakan diterima, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah desa dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh akuntabilitas, transparansi, responsivitas terhadap pengelolaan dana desa guna kesejahteraan masyarakat.**

Hasil analisis uji simultan menunjukkan bahwa Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsivitas secara bersama-sama memengaruhi cara pengelolaan dana desa secara signifikan. Hal ini terbukti karena memiliki nilai signifikansi 0,000 dan nilai F-hitung 14,235. Karena nilai signifikansi terletak di bawah tingkat signifikansi 0,05, maka model regresi yang digunakan dianggap cukup baik dan

mampu menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung dalam penelitian ini, hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam penelitian ini. Menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, melainkan oleh kombinasi beberapa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun secara parsial akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan, keberadaannya tetap mendukung transparansi dan responsivitas dalam menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih baik.

### **Pengaruh akuntabilitas, transparansi, responsivitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa melalui kesejahteraan masyarakat.**

Hasil dari pengujian *Moderated Regression Analysis (MRA)*, dinyatakan bahwa variabel interaksi antara akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dengan kesejahteraan masyarakat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pengelolaan dana desa. Hasil tersebut didapatkan dari nilai signifikansi pada individu variabel interaksi, yakni X1M bernilai 0,048, X2M bernilai 0,821, dan X3M bernilai 0,036. Hasil ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat berperan sebagai variabel moderasi pada hubungan variabel akuntabilitas dan pengelolaan dana desa serta antara responsivitas dan pengelolaan dana desa. Sebaliknya, kesejahteraan masyarakat tidak terbukti mampu memoderasi hubungan antara transparansi dan pengelolaan dana desa.

Kesejahteraan masyarakat sebagai variabel moderasi berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas terhadap pengelolaan dana desa. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih baik cenderung memiliki kesadaran, partisipasi, dan kemampuan pengawasan yang lebih tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Tingkat kesejahteraan yang baik mencerminkan bahwa program dan kegiatan yang didanai oleh dana desa telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun kualitas hidup

### **KESIMPULAN dan SARAN**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara parsial (uji t) variabel akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sementara itu, variabel transparansi dan responsivitas terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi serta kemampuan pemerintah desa dalam merespons kebutuhan masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian simultan (uji F), akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Adapun hasil uji moderasi menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya mampu memoderasi hubungan secara parsial. Kesejahteraan masyarakat terbukti memoderasi pengaruh akuntabilitas dan responsivitas terhadap pengelolaan dana desa secara signifikan, sedangkan pada hubungan antara transparansi dan pengelolaan dana desa, kesejahteraan masyarakat tidak menunjukkan pengaruh moderasi yang signifikan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data persepsi yang diperoleh melalui kuesioner, sehingga jawaban responden berpotensi mengandung subjektivitas. Selain itu, penelitian hanya dilakukan pada satu desa dengan periode pengamatan tertentu sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas pada seluruh desa yang memiliki karakteristik berbeda. Pengukuran kesejahteraan masyarakat juga masih didasarkan pada persepsi responden dan belum mengombinasikan indikator kesejahteraan yang bersifat objektif.

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan mengembangkan penelitian dengan mengembangkan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan prinsip *Good Governance*, seperti partisipasi masyarakat, efektivitas pengendalian internal, kompetensi sumber daya aparatur desa, dan kualitas pelayanan publik. Kehadiran variabel tambahan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih aktual mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk Pemerintah Desa disarankan untuk lebih meningkatkan akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa agar seluruh proses pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## REFERENSI

- Arsyadita, A., Haryanto, A. T., (2023). Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Sraten Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo:(Studi Kasus Responsivitas Dalam Pelayanan Solidaritas: *Jurnal Ilmu*, 6. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/download/9740/5348>
- Azis, M. A., & Tatmimah, I. (2025). Pengelolaan Dana Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Di Desa Bojong Kulon. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, 4(2), 1–19.
- Azizah, W. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Andayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Budiarti, P. A., & Retnani, E. D. (2021). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam*.
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda) Emilianus. *Accounting Unipa*.
- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. 2(1), 39–43.
- Jamaluddin, M. (2021). *Kontribusi Teori Contingency: Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui E-Government Di Indonesia Jamaluddin Majid*. 63.
- Jempper, J., & No, V. (2022). *Masyarakat Pada Desa Semowo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang ?* 1(3).
- Lestari Labangu, Y., Ode Anto, L., & Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo, J. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Pada Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 7(2), 223–235. <http://jak.uho.ac.id/index.php/journal/issue/archive>
- Maghfirah, N., Rahman, K. G., & Marlinah, A. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. *Manuver: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 52–64. <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/manuver>
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2022). Good Governance. In *ペインクリニック学会治療指針 2*.
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal Education And Government Wiyata*, 1(1), 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-govhalaman40>
- Setyaningrum, A., Dewi, W. M., & Kusuma, L. I. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 1(2), 581–589. <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323>
- SITUMORANG, L. (2024). *SKRIPSI Oleh : Universi Tas Medan Area Oleh : Lita Situmorang*.
- Telaumbanua, A., & Ziliwu, N. (2022). Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 108–123.
- Udzmah, S. L., Amalia, F. A., & Wicaksono, A. P. N. (2024). Analisis Penerapan Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 9(1), 31–42. <https://doi.org/10.29407/jae.v9i1.21823>
- Wahyuni, P., Harahap, A. H., Batubara, R. L., & Zein, A. W. (2026). *Kajian Kualitatif Teori-Teori Good Corporate Governance Dalam Tata Kelola Perusahaan Putri Wahyuni Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Afni Haryanti Harahap Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Ahmad Wahyudi Zein*. 4(1), 622–627.
- Wiwik Lestari, Dyah Palupiningtyas, Dyan Triana Putra, Septa Intiar, & Umar Abdul Jabbar. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Guna Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Semowo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 1(3), 372–378. <https://doi.org/10.55606/jempper.v1i3.971>